



Keterbatasan Layanan Perdesaan dalam Melindungi Perempuan: Studi Awal di Wilayah Desa

Limitations of Rural Services in Protecting Women: A Preliminary Study in Rural Areas

Sahru Azkiya Putra^{1*}, Harmona Daulay²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: sahruazkiya@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 27-05-2026

Revised : 29-05-2026

Accepted : 31-05-2026

Published : 02-06-2026

Abstract

Protecting women in rural areas remains a challenge because the various services available are not fully able to meet their needs. This study aims to analyze the reasons why rural services are unable to provide optimal protection for women and to identify the limitations of services experienced by women in villages. The study used a literature review method with a qualitative approach through a review of various scientific journals, books, government reports, and relevant publications published between 2020 and 2025. Data were analyzed using content analysis techniques to identify patterns related to women's protection and rural services. The study results indicate that the suboptimal protection of women is influenced by the low capacity of village officials, limited resources, weak coordination between institutions, and the persistence of patriarchal culture in rural communities. Furthermore, women in rural areas still experience various service limitations, such as limited access to health and welfare services, lack of legal assistance and protection, low participation in village development, and limited access to information about available services. These findings indicate that improving the quality of rural services and strengthening the gender perspective in village development are necessary to create a more effective, inclusive, and sustainable protection system that addresses women's needs.

Keywords: *women's protection, rural services, rural women*

Abstrak

Perlindungan perempuan di wilayah perdesaan masih menjadi tantangan karena berbagai layanan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab layanan perdesaan belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan serta mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbatasan layanan yang dialami perempuan di desa. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan publikasi relevan yang terbit pada periode 2020–2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola temuan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan layanan perdesaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum optimalnya perlindungan perempuan dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat desa. Selain itu, perempuan di wilayah perdesaan masih mengalami berbagai keterbatasan layanan, seperti terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan, kurangnya pendampingan dan perlindungan hukum, rendahnya partisipasi dalam pembangunan desa, serta minimnya akses informasi mengenai layanan yang tersedia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan perdesaan dan penguatan perspektif gender dalam pembangunan desa diperlukan untuk



menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan perempuan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *perlindungan perempuan, layanan perdesaan, perempuan desa*

PENDAHULUAN

Perlindungan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan yang berkeadilan gender. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah, perempuan yang tinggal di wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, seperti kekerasan berbasis gender, keterbatasan akses kesehatan, rendahnya akses terhadap informasi, serta minimnya perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan perlindungan perempuan dengan kapasitas layanan yang tersedia di tingkat desa (Kementerian PPPA, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mendorong implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya memperkuat perlindungan kelompok rentan di wilayah perdesaan. Program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa sekaligus memperluas akses terhadap layanan sosial dan perlindungan. Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat desa mengenai isu gender, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat (Darmaningrum & Ardiansyah, 2024).

Di sisi lain, penelitian Muhartono, Widiasih, dan Musleh (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan perempuan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika perempuan tidak memiliki ruang partisipasi yang cukup, maka berbagai kebutuhan spesifik mereka cenderung tidak terakomodasi dalam kebijakan maupun pelayanan publik desa.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena perempuan desa juga menghadapi kendala dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani dkk. (2024) menemukan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan di desa, mulai dari keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendamping, hingga rendahnya akses informasi mengenai layanan yang tersedia.

Selain itu, kerentanan perempuan di desa tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat. Hamdy dan Hudri (2022) menjelaskan bahwa struktur sosial patriarkal sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam relasi sosial sehingga berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dan diskriminasi. Dalam kondisi demikian, keberadaan layanan perdesaan yang responsif menjadi sangat penting untuk memastikan perempuan memperoleh perlindungan yang memadai.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak membahas kekerasan berbasis gender, implementasi program DRPPA, kesehatan reproduksi perempuan, maupun kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara kapasitas layanan perdesaan dengan perlindungan perempuan secara menyeluruh. Padahal, layanan perdesaan merupakan institusi yang paling dekat dengan kehidupan perempuan desa dan menjadi pintu pertama dalam penyediaan



perlindungan sosial, kesehatan, maupun hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami penyebab layanan perdesaan belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan serta mengidentifikasi berbagai bentuk keterbatasan layanan yang mereka alami.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta mencegah berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang dapat menghambat kehidupan sosial mereka. Dalam konteks pembangunan masyarakat, perlindungan perempuan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan hukum semata, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, ekonomi, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan publik yang layak. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, kesempatan yang setara, serta akses terhadap berbagai layanan yang dapat mendukung kualitas hidup mereka.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2023), perlindungan perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berperspektif gender karena masih terdapat berbagai bentuk kerentanan yang dialami perempuan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan publik. Perlindungan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, hingga masyarakat lokal agar mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat desa, perlindungan perempuan memiliki tantangan yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendampingan hukum, maupun ruang partisipasi dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, perlindungan perempuan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem layanan yang mampu menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Layanan Pedesaan

Layanan perdesaan merupakan berbagai bentuk pelayanan yang disediakan oleh institusi desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan masyarakat. Keberadaan layanan perdesaan menjadi unsur penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.

Menurut Wijaya, Noersyahbani, dan Zerrer (2024), layanan publik di wilayah perdesaan memiliki peran strategis dalam membangun hubungan sosial masyarakat sekaligus menjadi sarana pemenuhan kebutuhan warga. Kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi desa. Sebaliknya, keterbatasan layanan dapat menimbulkan kesenjangan akses bagi kelompok rentan, termasuk perempuan.

Dalam konteks perlindungan perempuan, layanan perdesaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang pengaduan, pendampingan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, efektivitas layanan perdesaan



sangat menentukan kemampuan desa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami berbagai bentuk kerentanan sosial.

Feminisme Liberal (John Stuart Mill)

Penelitian ini menggunakan Teori Feminisme Liberal yang dikemukakan oleh John Stuart Mill sebagai landasan untuk memahami pentingnya kesetaraan perempuan dalam memperoleh akses terhadap perlindungan dan layanan publik. Feminisme Liberal berangkat dari gagasan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai individu sehingga keduanya harus memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan pelayanan sosial.

John Stuart Mill melalui karyanya *The Subjection of Women* menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender bukan muncul karena perbedaan kemampuan alami antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena adanya sistem sosial yang membatasi kebebasan perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik. Menurut Mill, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya karena setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial (Hansson, 2022).

Pemikiran Mill kemudian menjadi dasar berkembangnya Feminisme Liberal yang menekankan bahwa berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihilangkan melalui pembukaan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, hukum, dan pelayanan publik. Costa (2020) menjelaskan bahwa Feminisme Liberal memandang perempuan sebagai individu yang memiliki kapasitas rasional yang sama dengan laki-laki sehingga tidak seharusnya mengalami pembatasan dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam konteks penelitian ini, teori Feminisme Liberal digunakan untuk melihat bagaimana perempuan di wilayah perdesaan masih mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan dan akses terhadap layanan yang memadai. Ketika layanan kesehatan, perlindungan sosial, maupun pendampingan hukum belum tersedia secara maksimal, maka perempuan tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, keberadaan layanan perdesaan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan yang dijelaskan oleh John Stuart Mill.

Teori Patriarki (Sylvia Walby)

Selain Feminisme Liberal, penelitian ini juga menggunakan Teori Patriarki yang dikembangkan oleh Sylvia Walby. Walby mendefinisikan patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan berada pada posisi yang lebih subordinat. Menurut Walby, patriarki tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tetapi juga bekerja melalui berbagai institusi sosial seperti budaya, pendidikan, ekonomi, politik, hingga pelayanan publik.

Sylvia Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui beberapa struktur utama, yaitu relasi rumah tangga, pekerjaan, negara, budaya, seksualitas, dan kekerasan terhadap perempuan. Struktur-struktur tersebut saling berkaitan dan membentuk ketimpangan yang menyebabkan perempuan lebih sulit memperoleh akses terhadap sumber daya maupun kesempatan sosial dibandingkan laki-laki (Anto dkk., 2023).



Dalam masyarakat perdesaan, budaya patriarki sering kali masih memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap posisi perempuan. Perempuan cenderung ditempatkan pada ranah domestik sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan maupun pembangunan desa menjadi terbatas. Penelitian Iqbal, Harianto, dan Handoyo (2023) menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi faktor yang memengaruhi ruang gerak perempuan desa dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Akibatnya, kebutuhan perempuan sering kali kurang menjadi perhatian utama dalam penyediaan layanan maupun kebijakan pembangunan desa.

Melalui Teori Patriarki, penelitian ini melihat bahwa keterbatasan layanan perdesaan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang diutamakan. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara budaya sosial masyarakat desa dengan belum optimalnya perlindungan perempuan melalui layanan perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai kajian yang membahas keterbatasan layanan perdesaan dalam perlindungan perempuan. Menurut Snyder (2020), studi literatur merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber ilmiah sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan dokumen ilmiah lainnya yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025 serta relevan dengan isu perlindungan perempuan, layanan perdesaan, dan kesetaraan gender.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian, seleksi, dan telaah literatur berdasarkan kesesuaian tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi berbagai bentuk keterbatasan layanan perdesaan serta faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan di wilayah desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Adlini dkk. (2022), analisis dalam studi pustaka dilakukan dengan mengorganisasi, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan Melalui Layanan Perdesaan

Berdasarkan hasil kajian literatur, perlindungan perempuan di wilayah perdesaan masih belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sosial, dan implementasi kebijakan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kualitas pelaksanaan program perlindungan perempuan di tingkat desa. Martiani, Yuwono, dan Supratiwi (2024) menjelaskan bahwa implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender, serta belum maksimalnya pelibatan perempuan dalam pembangunan desa. Akibatnya, program yang dirancang untuk memperkuat perlindungan



perempuan belum mampu memberikan dampak yang merata pada seluruh perempuan di wilayah perdesaan.

Faktor berikutnya adalah lemahnya integrasi antara kebijakan perlindungan perempuan dengan kondisi sosial masyarakat desa. Putra (2024) menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan program perlindungan perempuan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun kebijakan telah dibentuk dengan perspektif gender, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya kasus kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan akses perempuan terhadap layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kemampuan desa dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang di sebagian wilayah perdesaan juga memengaruhi kualitas perlindungan perempuan. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan menyebabkan perempuan memiliki ruang yang lebih terbatas dalam menyampaikan kebutuhan maupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut sejalan dengan Teori Patriarki Sylvia Walby yang menjelaskan bahwa ketimpangan gender terbentuk melalui sistem sosial yang memengaruhi akses perempuan terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pelayanan publik. Akibatnya, kebutuhan perempuan sering kali belum menjadi fokus utama dalam pelayanan desa.

Jika dikaitkan dengan Teori Feminisme Liberal John Stuart Mill, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan di wilayah perdesaan masih belum memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses perlindungan, pelayanan sosial, maupun ruang partisipasi dalam pembangunan desa. Padahal, kesetaraan akses menjadi bagian penting dalam menciptakan perlindungan perempuan yang efektif dan berkelanjutan.

Bentuk Keterbatasan Layanan Perdesaan terhadap Perempuan

Bentuk keterbatasan layanan yang dialami perempuan di wilayah perdesaan terlihat pada akses pelayanan, partisipasi pembangunan, dan perlindungan sosial. Salah satu bentuk yang paling sering ditemukan adalah keterbatasan akses perempuan terhadap layanan yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan mereka. Program perlindungan perempuan sering kali belum menjangkau seluruh kelompok perempuan karena adanya hambatan informasi, kurangnya pendampingan, dan minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pelaksanaan program desa.

Penelitian mengenai pendampingan menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan program perlindungan perempuan secara menyeluruh. Akibatnya, perempuan belum sepenuhnya memanfaatkan layanan yang tersedia karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah desa (Dharmahita, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan yang sebenarnya telah tersedia menjadi kurang efektif dalam menjawab kebutuhan perempuan di lapangan.

Keterbatasan lainnya terlihat pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Pasciana dkk. (2024) menjelaskan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam terlibat pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Padahal, keterlibatan perempuan sangat penting agar kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan



perempuan. Ketika perempuan tidak memiliki ruang partisipasi yang cukup, maka berbagai program perlindungan yang dijalankan cenderung kurang responsif terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Selain itu, perempuan juga masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan atau permasalahan sosial. Mekanisme pengaduan, pendampingan, dan perlindungan hukum di beberapa wilayah perdesaan masih belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas layanan. Akibatnya, perempuan yang mengalami masalah sering kali tidak memperoleh bantuan secara cepat maupun berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keterbatasan layanan perdesaan terhadap perempuan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya program perlindungan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas pelaksanaan, budaya sosial yang masih patriarkal, serta terbatasnya akses perempuan terhadap ruang partisipasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas layanan desa, peningkatan partisipasi perempuan, serta pelaksanaan kebijakan yang lebih responsif gender menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan perempuan di wilayah perdesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, keterbatasan layanan perdesaan dalam perlindungan perempuan disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, belum optimalnya pelaksanaan program perlindungan perempuan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi akses perempuan terhadap pelayanan publik. Keterbatasan tersebut terlihat dalam bentuk kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan, terbatasnya pendampingan serta perlindungan hukum, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, dan belum meratanya informasi mengenai layanan yang tersedia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas layanan desa, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan yang lebih responsif gender menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan perempuan yang lebih efektif dan inklusif di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, K. P. P. dan P., & PPPA), (Kemen. (2022). *Perempuan Indonesia*. 8(1), 1–296.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Hansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. *Journal of Ethics*, 26(3), 433–453. <https://doi.org/10.1007/s10892-022-09393-7>
- Hasanah, U. (2023). Akses Perempuan di Bidang Pendidikan. In *Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki* (Vol. 8).
- Hayudya, W., Fathurrozaq, M., & Rif, D. (2024). *Assistance to Wonopringgo Village Towards a Women-Friendly and Child-Caring Village*. 1(1), 58–61.
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 95–108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>



- Nathasya, H. (2024). No TitleEΛENH. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Pasciana, R., Juliasih, L., Iriany, I. S., Karmila, M., & Febrina, R. I. (2024). Transformasi Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 8585(5), 1. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v5i1.38557>
- Paula, D. De, & Costa, C. (2020). *O pensamento liberal utilitarista de John Stuart Mill e o florescimento do feminismo*. 2, 147–158.
- Politik, D., Purbalingga, A. D., & Desa, P. (n.d.). 1, 2, 3.
- Putra, I. P. A. P. (2025). Pembangunan Desa berbasis Gender: Analisis Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan di Kota Denpasar. *Jurnal Good Governance*, 189–202. <https://doi.org/10.32834/gg.v21i2.945>
- Rahmawati. (2020). 22-Article Text-43-1-10-20200411. 2(6).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Wijaya, I. M. A., Noersyahbani, P., & Zerrer, N. (2025). *Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat Perdesaan akibat Digitalisasi Layanan Publik*. 2(3), 89–96.